

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pandangan masyarakat dunia mengenai Inggris tidak sama sekali buruk, justru Inggris dinobatkan sebagai negara impian untuk ditinggali. Dengan pendapatan rata-rata, sewa rumah, harga properti dan biaya perjalanan disetiap kotanya mendapat nilai tinggi untuk kualitas hidup masyarakatnya yang menginginkan hidup bahagia dan terpenuhi secara finansial. Akses masyarakat untuk fasilitas umum seperti hiburan, kesehatan dan layanan lainnya juga sangat mudah dijangkau untuk membantu kebutuhan hidup. Selain itu, untuk pendidikan pun Inggris menempati kualitas pengajaran terbaik, misalnya Birmingham memiliki standar pengajaran yang sangat baik untuk mendapatkan pendidikan. Sedangkan untuk keselamatan, situasi pasar kota yang tenang menawarkan lingkungan yang aman dan tingkat kejahatan yang rendah sehingga cocok untuk lingkungan keluarga. Toko-toko, ruang olahraga dan ruang terbuka hijau dengan banyak jalan setapak pun sangat banyak yang disediakan pemerintah (One Family).

Fakta menyedihkan mengungkapkab bahwa dibalik semua kesejahteraan dan kepuasan hidup yang ditawarkan Inggris kepada masyarakatnya terselip kisah menyedihka, yaitu perbudakan. Perbudakan dalam bentuk apapun merupakan bentuk kejahatan yang paling menakutkan dalam sejarah kehidupan manusia. Kegiatan ini seolah menjadi hal yang sangat sulit untuk dihapuskan, jika diandaikan sebagai sebuah penyakit, maka penyakit ini akan terus muncul dalam bentuk baru. Sedangkan dalam kasus ini seperti para pelaku kejahatan kasus perbudakan akan terus dan terus muncul terkembang dengan metode baru seiring dengan berjalannya waktu dan majunya teknologi informasi. Oleh karena itu,

upaya yang harus dilakukan untuk menghapuskan kasus ini strategiya perlu diperbarui juga sehingga tidak bisa mengandalkan strategi lama walaupun berhasil menangkap korban perbudakan modern.

Perbudakan dalam konteks waktu terjadinya terbagi menjadi dua yaitu, perbudakan tradisional dan perbudakan modern. Perbudakan modern adalah keadaan dan situasi dimana memiliki budak dan mempekerjakannya adalah hal yang legal. Tidak bersinggungan dengan masalah pelanggaran HAM juga tidak ada tuntutan untuk membebaskan budaknya. Budak pun tidak hanya dijadikan barang kepemilikan dan dijadikan pekerja. Para kolonialisme pada kala itu melihat perbudakan sebagai lahan bisnis yang sangat menguntungkan.

Berdasarkan data ILO nilai keuntungan dari bentuk kerja paksa mencapai US \$ 144,3 miliar per tahun di negara Industri dimana untuk keuntungan perdagangan manusia dari eksploitasi kerja paksa adalah 3,8 miliar di negara Industri. ILO juga memperkirakan nilai perdagangan manusia yang terjadi di seluruh dunia ± \$32 miliar per tahun dan hampir setengah dari jumlah tersebut yaitu sekitar \$15,5 miliar per tahun adalah nilai dagang manusia ke negara industri. Nilai perbudakan jenis baru sekitar sepuluh tahun yang lalu masih lebih murah daripada harga budak sebelumnya. Harga budak pertanian di Albania pada tahun 1850 sebesar \$1000, sedangkan pada tahun 2001 harga seorang budak dapat dibeli dengan harga \$100. Meskipun harga budak sudah turun sejak tahun 1950 keuntungan yang didapat pelaku masih besar dan nilai budak dalam skala global mencapai \$12,3 miliar per tahun.

Nilai Budak masa lalu menjadi mahal disebabkan oleh para kolonialisme banyak terlibat dalam investasi bisnis perbudakan. Sedangkan saat ini, budak hanya dimanfaatkan sebagai investasi jangka pendek, selain karena kepemilikan budak bukan hal yang legal tapi juga karena ada hukum yang mengatur jika tertangkap melakukannya dan seluruh

masyarakat dunia telah mengutuk kasus sebagai kejahatan yang harus dimusnahkan.

Perbudakan sudah terjadi seluruh dunia sejak abad ke-14 sampai hari ini baik di negara maju yang syarat akan kebutuhan hidup beserta fasilitas yang super lengkap dan di negara berkembang atau terbelakang yang memang sangat rentan keadaan masyarakatnya karena ketidaktahuan perihal hak-hak dalam pekerjaan dan hak-hak sebagai manusia serta keadaan hidup yang serba terbatas yang memungkinkan mereka untuk menjadi korban atau terlibat dalam aksi perbudakan modern. Dan kini, perbudakan tidak akan memandang calon korbanya dari satu suku, bangsa, negara, ras ataupun agama, tetapi siapapun dan berasal dari manapun calon korban apabila mereka terjebak dalam penipuan para pelaku maka mereka adalah calon korban perbudakan.

Sistem perbudakan lama tidak menjadikan bisnis perbudakan menjadi tujuan utama dalam mencari keuntungan yang besar, tapi akan difokuskan untuk keperluan pribadi yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Budak pada masa lampau lebih memiliki hidup yang lebih baik daripada saat ini yang sangat tidak diperlakukan seperti manusia. Budak masa lampau punsetidaknya masih diberikan tempat tinggal, pakaian seadanya dan kebebasan bergerak (minimal dalam lingkungan pekerjaan). Dari pandangan penulis, keadaan budak modern lebih menderita dimana mereka bahkan tinggal ditempat yang buruk, kotor dan sangat tidak layak. Budak tidak akan diperhatikan pakaiannya, makanan dan kesehatan serta keamanan selama bekerja. Alasan para kolonialisme dan pemilik budan sangat teliti latar belakang budak mereka, kemungkinan disebabkan oleh kinerja dan kemampuan dari beberapa etnik tertentu berbaik dengan pelaku saat ini yang mengambil dari semua negara dan latar belakang.

Ketika orang-orang Eropa khususnya Inggris sadar bahwa menguasai kehidupan orang lain untuk tujuan pribadi ataupun lainnya ternyata telah menghalangi seseorang untuk hidup bebas, kemudian muncul gerakan untuk merubah,

menghapuskan dan memusnahkan sistem perbudakan. Mulai dengan berupaya membebaskan beberapa budak, melobi pejabat lokal, membentuk kelompok anti perbudakan dan akhirnya berusaha untuk melobi pemerintah Inggris untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang menyatakan bahwa perbudakan adalah aktivitas yang harus dihentikan. Gerakan ini pun sampai pada pertemuan penting yang dihadiri kepala negara seperti konvensi *United Nations tahun 1926, Slavery Convention 1956, Supplementary Convention 1926, Sexual Offence Act 2003, Asylum and Immigration Act 2004* dan yang terbaru adalah *Modern Slavery Act 2015*.

Gerakan untuk menghapuskan perbudakan menjadi hal yang menarik seiring bertambahnya pengetahuan masyarakat luas akan bahaya dan merugikannya perbudakan apabila terus dibiarkan. Dari gerakan kelompok kecil bertambah luas menjadi gerakan kelompok besar yang menangani kasus serupa dalam skala internasional di berbagai negara. Kelompok kecil ini adalah pelopor gerakan penghapusan perbudakan yang ada di Inggris. Bergerak dengan tujuan utamanya adalah adanya kebijakan pemerintah dan undang-undang tentang perbudakan, imigrasi, perlindungan korban perbudakan dan hukuman bagi pelaku kejahatan ini. Mereka bekerja dalam waktu yang sangat lama melalui jalan panjang sebelum akhirnya mendapat pengakuan bahwa kasus perbudakan penting untuk dibahas lebih lanjut.

Kelompok ini kemudian meluaskan pengaruhnya dengan menjalin kerja sama dengan kelompok lain yang memiliki visi dan misi yang sama untuk menghapuskan perbudakan. Setelah itu, kelompok-kelompok ini melakukan kampanye dengan tujuan mengedukasi masyarakat dan menjelaskan bagaimana perbudakan bisa terjadi, serta menekan pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan yang melindungi korban perbudakan. Harapannya ketika masyarakat sudah mengenali hal-hal yang berhubungan dengan perbudakan mereka dapat melapor kepada pihak yang berwenang. Dan perlindungan terhadap korban perbudakan pun dapat terlaksana dengan baik.

Kelompok pun membentuk organisasi yang pada awal berdiri bernama *Anti Slavery Society* dan baru setelah itu merubahnya menjadi *Anti Slavery International*. Sebenarnya, pemerintah sudah sejak lama memerhatikan dan melakukan upaya untuk menghapuskan perbudakan. Namun, pemerintah belum sepenuhnya bergerak untuk memerangi perbudakan. Kehadiran *Anti Slavery International* ini adalah untuk mendorong pemerintah dan menekannya untuk segera membuat kebijakan dan undang undang mengenai perbudakan, perdagangan manusia dan imigrasi. *Anti Slavery International* dengan loyal megawasi dan mengantisipasi kekeliruan yang dibuat pemerintah Inggris dalam menerapkan kebijakannya.

Anti Slavery International dengan tangan terbuka menerima kelompok manapun yang ingin bekerja sama, termasuk dari *International Organization, Non-Government Organization* ataupun pemerintah sekalipun. Karena dengan menguatkan visi dan misi untuk memberantas perbudakan adalah hal yang harus dilakukan. Pemerintah Inggris pun mengakui bahwa tidak akan bisa dengan kekuatan sendiri untuk memerangi perbudakan yang sudah menjalar secara luas di berbagai sektor industri dan pertanian. Dengan posisinya sebagai pioneer untuk memberantas perbudakan dan perdagangan manusia, *Anti Slavery International* dipercaya oleh Pemerintah Inggris, *United Nations* dan *International Labour Organization* sebagai penasihat, pengawas dan/atau turut serta dalam pembuatan kebijakan tentang perbudakan.

Untuk Menyelesaikan masalah perbudakan semua pihak harus berani memotong akar permasalahannya, yaitu dengan menghentikan tindakan diskriminasi, menghapuskan kemiskinan, meningkatkan pendidikan, memberikan peluang yang luang untuk kegiatan ekonomi, memperbaiki masalah status migrasi, menguatkan supremasi hukum dan lainnya. Keterlibatan multi-aktor dipandang sebagai langkah yang penting untuk dibangun untuk menangani masalah perbudakan secara efektif. Dan perbudakan akan berakhir jika perubahan besar dilakukan secara serentak, yaitu ketika masyarakat dan

lembaga mengadopsi norma sosial baru untuk menolak perbudakan, ketika orang-orang yang terjebak perbudakan sudah menyadari hak-haknya dan ketika pemerintah dan pengusaha menyediakan dan menerapkan hukum dan kebijakan untuk melindungi orang dari perbudakan.

Apabila bersandar pada pendapat yang dikemukakan oleh Kevin Bales untuk melihat masalah perbudakan di era globalisasi ini dapat terlihat dampak buruk dan baiknya. Pertama, dampak buruk masalah ini muncul dari banyaknya tekanan terkait masalah upah dan harga pekerja yang menyebabkan meningkatnya persaingan dan protabilitas modal lintas batas operasi bisnis dari negara-negara dunia pertama ke negara dunia ke tiga. Kurang banyak yang mengetahui bahwa pemasok bahan baku di negara berkembang juga mengalami hal yang serupa dan karenanya (terkadang) menggunakan perbudakan sebagai cara untuk mengurangi biaya pengeluaran. Adanya aliran modal asing ke negara yang belum memiliki regulasi nasional yang efektif menyebabkan munculnya korupsi, dimana kondisinya ketika seseorang mengambil pekerja murah untuk menekan biaya produksi dan mengambil sebagian biaya yang masuk untuk keuntungan pribadi.

Kedua, dampak positif dari globalisasi ketika semua orang menaruh perhatian pada masalah eksploitasi yang ekstrim ini. Apabila ingin memberantas kasus ini, maka ia perlu melakukan peningkatan kualitas pendidikan untuk langkah awal namun penting. Setelah itu mencari celah untuk mengontrol transfer informasi yang begitu luas. Untungnya, beberapa waktu belakangan ini, perbudakan semakin mudah untuk diperdebatkan bahwa manusia memiliki hak untuk tidak diperbudak dan melakukan penyiksaan atau pembunuhan, seperti yang tertulis dalam Deklarasi HAM universal.

Yang terpenting, tidak berhenti untuk melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perbudakan dengan segala bentuknya dan memperkuat organisasi-organisasi amal dan non-pemerintah. Bahkan jika semua cara tersebut sudah dilakukan, masih ada hal lain yang harus dihadapi yaitu merehabilitasi korban perbudakan.

Menurut Kevin Bales nilai perbudakan tidak seperti angka-angka yang menakutkan bahwa jika menghentikan kasus ini akan mengganggu ekonomi. Mungkin masalah perbudakan tidak menarik perhatian internasional atau hanya bernilai rendah jika dihubungkan dengan persoalan ekonomi. Manusia mungkin akan menemukan cara baru untuk memperbudak orang lain, tetapi jika tetap optimis dalam perang melawan perbudakan pasti akan menemukan cara yang baru juga untuk menghentikannya. Dan perbudakan mungkin tidak pernah musnah secara permanen layaknya penyakit menular, akan tetapi jika terus ditekan dan dikendalikan kondisinya akan ditemukan cara baru untuk memerangnya (Bales, 2000).

Inti dari pembahasan topik perbudakan yang terjadi di Inggris ini adalah, perbudakan masih menjadi musuh bersama seiring munculnya bentuk baru perbudakan. Untuk melakukan observasi mengenai jumlah pasti korban yang terjebak dalam perbudakan modern, pemerintah Inggris tidak bisa dengan sendirinya melakukan hal ini. Untuk menyadarkan betapa pentingnya untuk membahas cara perbudakan modern diberhentikan atau dimusnahkan, *Anti Slavery International* lah yang gencar melakukan penekanan. Inggris sebagai posisi yang absolute memegang kekuasaan untuk urusan perlindungan negara melalui kebijakan dan ketetapan hukumnya harus “didorong atau ditekan” oleh *Anti Slavery International* dan NGO atau aktivis anti-perbudakan lainnya untuk menghentikan sistem perbudakan yang merugikan kehidupan manusia dimanapun dan darimana pun asal korban perbudakan.

Hal ini seperti menjelaskan bahwa pengaruh yang diberikan secara rutin dan berkelanjutan oleh *Anti Slavery International* kepada pemerintah Inggris untuk membuat kebijakan dan undang-undang yang melindungi para korban perbudakan dan menghukum pelaku kejahatan sangat penting. Hal ini seperti juga disebabkan oleh posisi *Anti Slavery International* sebagai NGO yang tidak mencari keuntungan dan lebih fokus untuk membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi. Dengan begitu dapat

disimpulkan bahwa *power* yang dimiliki *Anti Slavery Internasional* begitu kuat dan tidak dapat diabaikan oleh masyarakat dunia.

4.2 SARAN

Berdasarkan kasus perbudakan yang dijelaskan pada BAB I sampai BAB III dan konsep *Two Faces of Power* dan *Pressure Group*, pernyataan yang menyebutkan bahwa *Anti Slavery Internasional* berhasil memengaruhi adalah benar, sebab *Anti Slavery Internasional* berhasil membuat pemerintah Inggris memperhatikan seruan dan kritikan tentang perbudakan modern yang semakin parah di Inggris dan perlu adanya perbaharuan tindaklanjut dalam mengatasi masalah perbudakan.

Selain itu, penulis menemukan poin yang sepenuhnya tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh *Anti Slavery Internasional* dalam mendorong pemerintah untuk menghapuskan dan memperbaiki fasilitas pelayanan dan bantuan *recovery* kepada para korban perbudakan modern. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya Undang-Undang baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2015 yang bernama *Modern Slavery Act* tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh *Anti Slavery Internasional*, tetapi ada pengaruh yang datang dari NGO lain, seperti, AFRUCA (*African Unite Against Child Abuse*), *Amnesty International UK*, *Anti Slavery International*, *Bawso*, *ECPAT UK*, *Hellen Bamber Foundation*, *Poppy Project (of Eaveas Housing for Woman)*, *TARA project (Trafficking Awareness Raising Alliance of Community Safety Glasgow (CSG))*, *WalkFree Foundation* dan *UNICEF UK*.

Demikian penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *Anti Slavery Internasional* untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kasus perbudakan modern di Inggris pada tahun 2013 – 2017 yang

kenyataannya dapat memengaruhi kebijakan domestik Inggris, tapi tidak sepenuhnya pengaruh tersebut disebabkan oleh Anti Slavery.